



Dana Hibah Tak Cair, Petani Ikan Kecewa

Bangli (Bali Post) -

Petani ikan di Bangli kecewa, menyusul tak bisa cairnya bantuan Pengembangan Usaha Mina Mandiri (PUMM) dari pemerintah pusat lantaran terbentur Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia.

Pada hal, dana itu sangat diharapkan untuk menunjang perkembangan pertaniannya. Wakil masyarakat kelompok pembudi daya perikanan Bangli I Ketut Wania, Rabu (21/10) kemarin menjelaskan bantuan itu sangat diharapkan oleh petani ikan. Sebab dianggap mampu

meningkatkan kesejahteraan mereka.

Jika bantuan tak bisa dicairkan lantaran penerima harus berbadan hukum, ia mengatakan hal itu menimbulkan kekecewaan dari sejumlah petani. "Petani sangat kecewa dengan hal ini. Padahal bantuan itu sangat diharapkan," katanya. Disampaikan pihaknya juga kecewa dengan sikap Dinas Peternakan dan Perikanan (P2) Bangli. Pasalnya, sosialisasi UU ini dianggap tidak serius.

"Sosialisasi hanya terbatas pada undang-undang itu diberlakukan. Tapi terkait dengan juklak-juknis pembentukan kel-

ompok berbadan hukum tidak diberikan," katanya. Wania menilai, ada indikasi Dinas P2 melakukan penolakan terhadap bantuan yang diberikan pemerintah pusat tahun 2015 ini. Hanya saja penolakan tersebut disampaikan secara halus. "Waktu ini kami dengar, Dinas P2 mengaku meminta saran kepada pemerintah pusat. Hibah ini digeser ke tahun 2016. Jadinya 2015 kan tidak ada. Itu kan mengindikasikan penolakan," paparnya.

Wakil masyarakat kelompok pembudi daya perikanan Bangli lainnya, Ketut Metu Kamajaya juga menyampaikan hal yang serupa. Jika pemerintah daerah

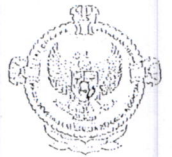
serius ingin meningkatkan kesejahteraan petani, tentunya hal ini harus disikapi dan disosialisasikan secara serius dan mendalam. "Kalau sosialisasi harus secara total. Tidak seperti sekarang, masih banyak yang tidak jelas," katanya.

Menanggapi persoalan itu, Kepala Dinas P2 I Wayan Sukartana mengakui pihaknya belum bisa mencairkan bantuan tersebut lantaran terganjal UU 23 tahun 2014. Meskipun demikian, sampai saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Departemen Perikanan. Hanya saja informasi yang diterima masih abu-abu.

"Departemen Perikanan belum memberikan sinyal terkait dengan proses realisasi bantuan ini," jelasnya. Terkait dengan tuduhan menolak bantuan dari pemerintah pusat, Sukartana mengatakan hal itu tidak ada. Yang ada hanya penundaan perealisasiannya. "Saya sudah sampaikan hal ini ke petani. Kami tidak menolak. Itu hanya penundaan. Kalau menolak, kita akan terus tidak dapat bantuan," tegasnya. Ditambahkan mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Bangli ini, pihaknya juga tidak melakukan pembiaran terhadap persoalan yang saat ini menyelimuti petani. (kmb45)

Edisi : Kamis, 22 October 2015

Hal : 8



Dermaga Pelindo Picu Pro Kontra

'Ini pekerjaan belum mulai, sudah dihentikan. Bagi kami ini sangat memalukan, dan ini langkah yang sangat keliru, langkah Satpol PP itu tidak profesional,'

(Dewan Buleleng)

SINGARAJA, NusaBali

Kewenangan Pemkab Buleleng dalam menyikapi rencana pembangunan dermaga curah cair oleh Pelindo III di Pelabuhan Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, timbulkan pro kontra dan berbagai reaksi.

DPRD Buleleng menilai, kabupaten tidak pantas mencampuri rencana pembangunan tersebut, karena tidak punya kewenangan. Langkah Sat Pol PP dalam memberi teguran kepada Pelindo III dianggap salah kaprah. Lembaga DPRD Buleleng melalui Komisi II, langsung ke lokasi pembangunan di Pelabuhan Celukan Bawang, Rabu (21/10) pagi, atau sehari setelah Satpol PP beri peringatan keras terhadap pihak Pelindo, karena pembangunan tersebut



DEWAN Buleleng saat sidak ke proyek dermaga curah Cellukan Bawang, kemarin.

dianggap belum kantong izin dari kabupaten.

Komisi II yang turun dipimpin oleh Ketua Komisi, Putu Mangku Budiasa bersama anggotanya Made Sudiarta. Mangku Budiasa menyebut, kehadirannya ke lokasi proyek untuk cross check terkait dengan penghentian pembangunan dermaga curah cair tersebut. Namun, Komisi II menilai langkah yang dilakukan Satpol PP merupakan tindakan yang keliru.

Masalahnya, sesuai amanat Undang-Undang 23 tahun 2014, kabupaten/kota tak punya lagi kewenangan mengatur wilayah pantai dan laut. "Jadi apa dasarnya? Ini pekerjaan belum mulai, sudah dihentikan. Bagi kami

ini sangat memalukan, dan ini langkah yang sangat keliru, bagi kami langkah Satpol PP itu tidak profesional," kata dia.

Namun, berbeda dengan tanggapan LSM. Badan Pengawas LSM Jari Simpul Buleleng, Wayan Purnamek justru menilai langkah Satpol PP menghentikan sementara proyek dermaga curah cair itu merupakan tindakan yang tepat.

Disebutkan, dalam UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran, setiap pembangunan dan hal lainnya di kawasan pelabuhan, harus berdasarkan rencana induk pelabuhan. Selain itu, harus ada pula kajian analisis dampak lingkungan (amdal) pelabuhan, UKL/UPL, serta rekomendasi

dari Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan (KSOP).

Purnamek pun menanyakan apakah proyek tersebut sudah mengantongi rekomendasi dari KSOP. "Sudahkah ada rekomendasi dari KSOP? Sudahkah ada Amdalnya? Jangan seenak udelya. Apa sih kontribusi untuk Buleleng. Sapol PP tegas saja, kalau perlu segel saja. Pembangunan itu tidak boleh arogan. Meskipun ini proyek pusat, kabupaten harus tahu. Kalau nanti ada masalah, yang dicari pertama itu bukan orang pusat, tapi orang kabupaten," kata Purnamek.

Sementara itu, GM Pelindo III Cabang Celukan Bawang, Dewa Adi Kumarajaya mengatakan, pembangunan dermaga curah cair itu bukan proyek bodong. Karena masalah perizinan itu dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. "Setahu kami, aturan itu mengenai lingkungan hidup itu kami penuhi. Sudah ada penetapan dari Gubernur Bali. Kami sesuaikan pembangunan dengan RIP yang diajukan. Kami tidak bodong," tegasnya.

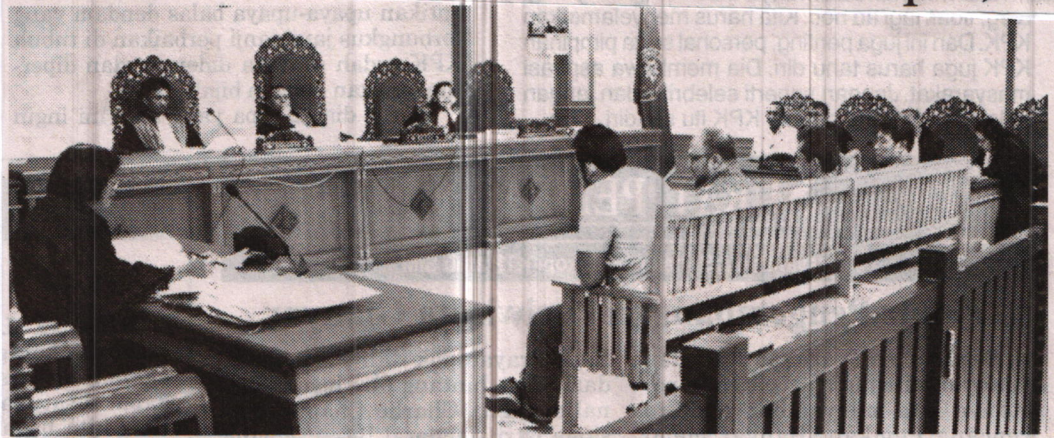
Seperti diberitakan sebelumnya, Polisi Pamong Praja Buleleng menghentikan sementara proyek dermaga curah cair di kawasan Pelabuhan Celukan Bawang. Ditengarai proyek tersebut belum melengkapi perizinan yang dibutuhkan. **k19**

Edisi : Kamis, 22 Okt 2015

Hal : 4



Kasus BNP2TKI Tiga Saksi Kompak Sebut Dodik Terima Rp 1,5 Miliar



Bali Post/wan

KONFRONTIR - Sejumlah saksi yakni Dodik (pencari tanah), Trusti Priyo Sambodo (pembawa uang) serta Paramarta (selaku pemilik lahan tanah) dihadapkan dan dikonfrontir dengan sejumlah terdakwa yakni Ketua KPA BNP2 PJTKI I Wayan Pageh dan Priyo Aji Santoso (bersaksi) di depan persidangan dalam agenda sidang dugaan korupsi pengadaan lahan tanah kantor BNP2 PJTKI Denpasar, Rabu (21/10) kemarin, di Pengadilan Tipikor, Jalan Tantular, Renon.

Denpasar (Bali Post) -

Peranan Wahyu Matodang alias Dodik selaku staf khusus Kepala BNP2TKI Djumhur Hidayat, posisinya makin terpojok dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (21/10) kemarin.

Sebelumnya, Kabareskrim Mabes Polri Anang Iskandar menyebutkan bahwa jika memang terbukti dalam persidangan, pihaknya langsung akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

Sidang kemarin, hakim pun meminta supaya jaksa penuntut umum (JPU) memperhitungkan Dodik, karena dalam fakta persidangan kemarin, tiga saksi menyebut bahwa Dodik menerima Rp 1,5 miliar dari *mark-up* pengadaan tanah BNP2TKI. Walau tiga saksi berulang-ulang dan secara tegas mengatakan bahwa Dodik terima uang, namun Dodik juga membantah bahwa dirinya tidak menerima uang di hotel ternama di Bali, sebagaimana disampaikan tiga saksi. "Biar-

kan saja tidak ngaku. Kan sudah dicatat oleh panitera. Jaksa tolong perhitungkan saksi ini," perintah ketua majelis hakim Edward Harris Sinaga.

Makin terangnya peranan orang lain yang bebas dari bidikan Mabes Polri, ketika majelis hakim melakukan konfrontir dalam sidang di Pengadilan Tipikor kemarin, justru ditemukan adanya pengakuan yang amat gamblang. Saksi yang dihadirkan untuk konfrontir

adalah Trusty Prio Sambodo, Nyoman Paramatha (status tersangka di Polda Bali) dan terdakwa Prio Adi Santoso. Mereka dikonfrontir dengan saksi Dodik. Semua saksi di depan persidangan memastikan uang Rp 1,5 miliar masuk ke Dodik.

Karena Dodik ngotot menolak, ketiga hakim yakni Edward Harris Sinaga, Dewa Suardita dan Nurbaya Goal sempat berang, dan meminta supaya tidak mengacaukan sidang. Paramarta dalam kesaksiannya mengatakan pada Jumat 25 November 2013 memang datang ke Hotel Inna Grand Bali Beach, bertemu Dodik dan dia bersama Trusty dan

terdakwa Prio diminta menarik uang. Hakim pun kemudian bertanya siapa yang menyuruh? Saksi dengan tegas mengatakan Dodik. Begitu juga kesaksian Trusty dengan polos mengatakan Dodik dan saksi Prio (juga juga terdakwa) kembali menegaskan Dodik. Hanya terdakwa Pageh, yang ditanya mengaku tidak tahu karena dia tidak ada di lokasi.

Atas jawaban itu, hakim kemudian bertanya pada saksi Dodik. "Bagaimana Dodik, benar kamu yang menyuruh?" tanya hakim. Dodik kemudian menjawab, "tidak ada, sama sekali tidak ada."

Hakim kemudian melan-

jutkan kronologi setelah yang ditarik Rp 750 juta di BNI. Uang itu diserahkan ke Dodik di Inna Bali Beach, yang menyerahkan Prio dan Trusty. Bahkan usai menyerahkan uang, Trusty dan Dodik sholat Jumat bersama di dekat hotel. Kembali ditanya, Prio dan Trusty, terkait penyerahan uang dan memastikan sudah pindah ke tangan Dodik, bahkan tas ransel Trusty yang berisi uang juga diserahkan dan belakangan dikembalikan. Walau pengakuan ini berulang-ulang disebutkan saksi dan hakim, namun Dodik tetap kekeh membantahnya. (kmb37)

Edisi : Kamis, 22 Okt 2015

Hal : 12



Pemkab Kembali Anggarkan Operasional Terminal Mengwi

Mangupura (Bali Post) -

Pemerintah pusat urung mengambil alih operasional Terminal Tipe A Mengwi, Badung tahun ini. Padahal, sesuai UU 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, terminal tipe A akan ditarik per 31 Desember 2015. Alhasil, pemerintah setempat harus kembali menanggung biaya operasional terminal tersebut.

Kepala Dishubinfokom I Wayan Weda Dharmaja ini mengatakan, dirinya kembali memasang anggaran untuk operasional terminal sebesar Rp 2 miliar. "Awalnya memang sudah tidak kami anggar lagi untuk operasional Terminal Mengwi. Tetapi dengan adanya peraturan baru ini, kembali kami poskan anggaran operasional pada RAPBD Induk tahun 2016," kata Weda Dharmaja, belum lama ini.

Menurut Weda Dharmaja, alasan pusat batal mengambil alih Terminal Mengwi tahun ini ditegas-

kan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, yang menyatakan pengambilalihan baru akan dilakukan per 31 Desember 2016. Dikatakan, persiapan pengambilalihan kewenangan Terminal Mengwi pada akhir tahun ini sebenarnya sudah tuntas. Persiapan yang dimaksud meliputi serah terima personel, pendanaan, sarana dan dokumen (P3D). "Sebenarnya semuanya sudah siap, akan tetapi Menteri Perhubungan kembali mengeluarkan

Edisi : Kamis, 22 Oktober 2015

Hal : 5



aturan baru. Pengambilalihan oleh pusat baru akan dilaksanakan 31 Desember 2016," ujarnya.

Di sisi lain, batalnya pengambilalihan Terminal Tipe A Mengwi oleh pemerintah pusat pada akhir tahun 2015 ini akan terganjal oleh sikap DPRD Badung yang terkesan ogah memberikan suntikan dana untuk operasional terminal di Mengwitani itu. Dewan Badung justru minta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) tetap menyerahkan terminal tipe A itu ke pusat. "Yang jelas kami keberatan (jika dibatalkan - red). Dulu katanya akhir tahun ini, ya... harus diambil alih akhir tahun ini," ungkap Ketua Komisi II DPRD Badung Nyoman Dirga Yusa, Rabu (21/10) kemarin.

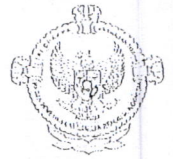
Dirga Yusa menegaskan,

penundaan pengambilalihan kewenangan terminal dari akhir tahun 2015 ke akhir tahun 2016 ini sangat berkaitan dengan posting anggaran. Apalagi, anggaran untuk Terminal Mengwi dari awal memang tidak disiapkan lagi. Termasuk di KUA/PPAS anggaran terminal juga sudah tidak dipasang lagi. "KUA/PPAS sudah tidak masuk. Artinya sesuai aturan mestinya tidak bisa karena KUA/PPAS kan sudah ditandatangani," tegasnya.

Dia berpendapat sangat aneh kalau anggaran terminal harus kembali dipasang di APBD 2016, sementara akhir tahun 2016 akan diambil oleh pusat. "Masak yang begini-begini bisa dibijaksana, sedangkan hibah untuk masyarakat tidak ada kebijaksanaan," ujarnya. (kmb27)

Edisi : Kamis, 22 Oct 2015

Hal : 5



Penerima Sumringah, Bedah Rumah Segera Terealisasi

NEGARA, NusaBali

Warga kurang mampu di Kabupaten Jembrana tampak sumringah setelah mendapat kepastian menerima bantuan bedah rumah dari Pemkab Jembrana. Tahun 2015 ini, Pemkab Jembrana kururkan 619 unit bedah rumah kepada keluarga kurang mampu. Bantuan program bedah rumah diserahkan secara simbolis oleh Bupati Jembrana I Putu Artha kepada para penerima maupun perwakilan penerima di Gedung Kesenian Bung Karno (GKBK) Jembrana, Selasa (20/10).

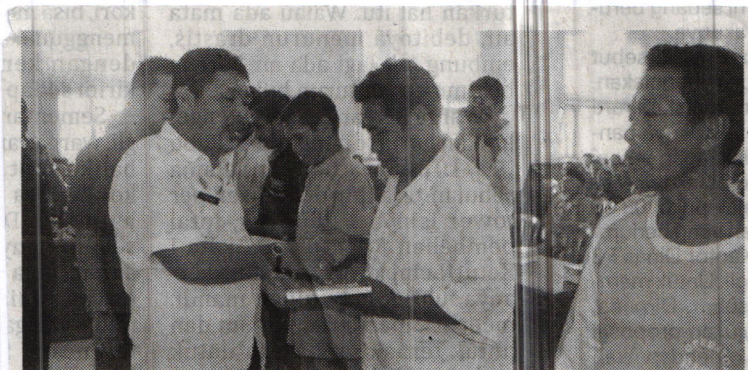
Sebanyak 619 bedah rumah tersebut, terdiri dari bantuan gabungan. Di antaranya 323

unit bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, 200 unit bantuan dari APBD Jembrana, dan 96 unit ditambah 1 paket sarana lingkungan dari Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (RSTLH-SPL) Kementerian Sosial RI.

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kesosnakertrans) Jembrana, I Wayan Gorim mengatakan, ratusan unit bantuan bedah rumah mencapai Rp 7 miliar lebih. "Jika dirinci batuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 323 unit dengan total

anggaran sebesar Rp 3,375 miliar. Bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni untuk

96 unit dan 1 paket sarana lingkungan dengan anggaran sebesar Rp 1,10 miliar, serta bantuan



• NUSABALI/IB DIWANGKARA
BUPATI Jembrana I Putu Artha didampingi Wabup Made Kembang Hartawan menyerahkan secara simbolis 619 unit bedah rumah di GKBK Jembrana, Selasa (20/10).

sosial bedah rumah APBD Jembrana sebesar Rp 3,4 miliar," terangnya.

Acara penyerahan dihadiri perwakilan Kementerian Sosial RI, serta Satuan Kerja Kementerian Rumah Swadaya Kementerian PUPERA RI, Sumaro, yang meminta agar bantuan bedah rumah tepat sasaran. Menanggapi permintaan itu, Bupati Artha yang didampingi Wabup I Made Kembang Hartawan memastikan mengawal program ini. "Saya pastikan bantuan itu diterima secara utuh tanpa ada potongan. Untuk itu penggunaannya tepat guna dan tepat sasaran," kata Bupati Artha. od

Edisi : Kamis, 22 Okt 2015

Hal : 3